

**KONFLIK ELITE PDI DALAM KONSTELASI POLITIK INDONESIA
(STUDI KASUS : KONFLIK ELITE PDI TAHUN 1993-1999)**

SKRIPSI

KK
Fis P 05/01
Sub
k



DISUSUN OLEH :

MURIES SUBIYANTORO
NIM. 079514677

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GASAL
2000/2001**

**KONFLIK ELITE PDI DALAM KONSTELASI POLITIK INDONESIA
(STUDI KASUS : KONFLIK ELITE PDI TAHUN 1993-1999)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

DISUSUN OLEH :

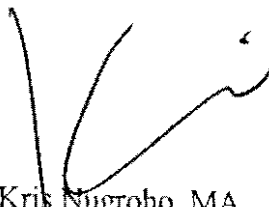
MURIES SUBIYANTORO
NIM. 079514677

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GASAL
2000/2001**

LEMBAR PERSETUJUAN/PENGESAHAN

Skripsi ini disetujui untuk diuji

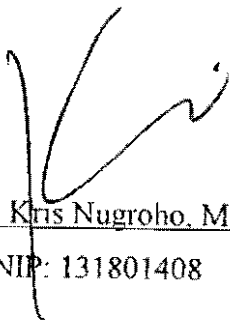
Mengetahui
Dosen Pembimbing Skripsi



Drs. Kris Nugroho, MA
NIP: 31801408

Skripsi ini telah dipresentasikan/dipertahankan dihadapan para penguji pada tanggal 11 Desember 2000


Ketua
Penguji Skripsi I



Drs. Kris Nugroho, MA
NIP: 131801408

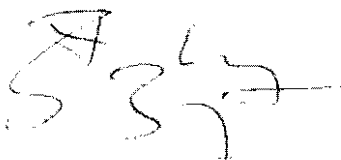
Para Anggota:

Penguji Skripsi II



Drs. Priyatmoko, MA
NIP: 130937952

Penguji Skripsi III



Drs. Aribowo, MS
NIP: 131453806

ABSTRAKSI

Fokus akhir dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana format politik negara dan kebijakan politik negara pada waktu itu (1993-1999) sehingga memunculkan konflik elite PDI yang begitu “dahsyat”, bagaimana peran dan posisi pemerintah dan militer dalam konflik tsb dan apa dampak politik konflik elite PDI terhadap perkembangan internal partai menjelang Pemilu 1999.

Konflik elite PDI ini pada mulanya hanya berkutat pada masalah internal saja, namun akhirnya konflik bertambah luas dan melebar cakupannya, disebabkan pihak eksternal partai juga ikut memperkeruh suasana. Tentunya pihak eksternal (baca: pemerintah dan militer) mempunyai maksud-maksud tertentu sehingga mereka sampai sejauh mungkin melakukan intervensi di dalam permasalahan PDI ini.

Berdasarkan data dan rangkaian analisis, dapat disimpulkan sebagai berikut. Negara Orde Baru yang mempunyai format politik Otoriter-Birokratik menjadikan negara sebagai pengatur tunggal dalam kehidupan politik masyarakat. Semua institusi-institusi politik bahkan individu-individu yang ada, harus patuh dan tunduk pada kebijakan negara tanpa reserve. Golkar sebagai partainya pemerintah harus selalu “diusahakan” untuk menang dalam setiap kali pelaksanaan pemilu, sebagai konsekuensi agar pemerintahan Soeharto tetap langgeng. Negara ketika itu melihat PDI merupakan “ancaman” bagi negara, ini terlihat ketika Pemilu 1992 lalu PDI memperoleh suara yang semakin besar jumlahnya. Dan, ketika PDI dipimpin Megawati maka PDI semakin memperoleh simpati dari kalangan “arus bawah”. Hal ini juga tidak terlepas dari sosok Mega sendiri yang merupakan anak kandung dari Bung Karno. Apalagi Mega selalu bersikap kritis terhadap segala kebijakan negara. Melihat kenyataan seperti ini, pemerintah dan militer semakin “gerah”, sehingga mereka mencoba melakukan berbagai macam cara untuk memporak-porandakan PDI. Hingga akhirnya terlaksana sebuah Kongres PDI di Medan 1996, yang menurut sebagian pengamat, pakar maupun pendapat masyarakat adalah kongres rekayasa pemerintah dan militer. Setelah ditelusuri lebih jauh ternyata memang pemerintah dan militer mempunyai andil besar dalam konflik PDI ini berupa penyediaan dana dan pemberian pengamanan, agar kongres berhasil dan ujung-ujungnya untuk menggeser Mega dari kepemimpinan PDI. Namun walaupun Mega “dikudeta” oleh pemerintah maupun militer, toh dukungan dari “arus bawah” bahkan dari kalangan menengah dan atas justru semakin besar. Mereka semua melihat Mega sebagai simbol dari ketertindasan dan perlawanan menegakkan kebenaran dan keadilan. Hasilnya adalah ketika Pemilu 1999 lalu, PDI Perjuangan di bawah pimpinan Megawati menjadi partai pemenang pemilu.

Kata Kunci: KONFLIK ELITE PDI, KONSTELASI POLITIK INDONESIA,

1993- 1999